

PERSEPSI *USERS* ATAS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah)

Dheny Purnomo

dhenypurnomo@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and analyze the perception among users (Government, Society and Supervisor) regarding financial accountability and public accountability on the financial statements of the Government of Central Sulawesi Province. Statistical test results analysis using One-way ANOVA with SPSS 17.0 shows that a) There is a difference of perception between Government, Society and Supervisor regarding financial accountability on the financial statements of the Government of Central Sulawesi province. b) There is a difference of perception between Government, Society and Supervisor regarding public accountability on the financial statements of the Government of Central Sulawesi province.

Keywords: *Accountability, financial accountability and public accountability*

Sejak era otonomi daerah yang memberi kekuasaan pengelolaan sumber daya ekonomi pada daerah masing-masing untuk dikelola sendiri, akuntabilitas menjadi panduan hidup sebagai bentuk kekuatan dalam mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat mengakibatkan kebocoran dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam PP Nomor 58/2005. Menurut Steccolini (2002) dalam Mulyana (2006) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Pendapat serupa yang dikemukakan Mack dan Ryan (2006) yang menyatakan bahwa ada tiga tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan keuangan tahunan sektor publik yaitu akuntabilitas keuangan (*financial accountability*), akuntabilitas publik (*publicaccountability*) dan pengambilan keputusan (*decision usefulness*).

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh yang

positif terhadap terciptanya akuntabilitas publik di daerah (Anondo, 2004). Selain itu, penyajian laporan keuangan daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012 dan Anies 2012). Akuntabilitas memiliki peran penting dalam proses bisnis pemerintah daerah. Hal ini terlihat laporan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk meraih predikat terbaik dari BPK dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Akuntabilitas yang diterapkan pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dengan cara memperoleh opini terbaik dari BPK menjadi kebanggaan tersendiri dari kepala daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD selaku wakil rakyat di daerah otonom, di mana sebelumnya laporan tersebut sudah diserahkan ke BPK untuk diaudit terlebih dahulu. Penyampaian laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas *agent* kepada *principal*. Ketika

terjadi kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent* maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sulawesi Tengah merupakan wilayah provinsi yang letaknya strategis yang memiliki keunggulan dalam pengembangan agrobisnis dan kelautan. Jika keunggulan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa dikelola dengan baik, maka dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar juga bisa turut dirasakan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional dan akuntabel, diantaranya menyajikan laporan keuangan kepada *users*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian tentang persepsi kelompok *users* mengenai akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar, penelitian ini terdapat tiga kelompok *users* yang terdiri dari *Government* yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), *Society* yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan akademisi, *Supervisor* yang diwakili oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis persepsi antara kelompok *users* mengenai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Agency Theory

Agency theory mendeskripsikan hubungan antara pemegang kekuasaan (*principal*) dan pelaksana (*agent*). Dalam hal akuntabilitas, *private sector* maupun *public sector* memiliki hubungan formal antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* memegang tanggungjawab untuk melakukan sesuatu dan mendapat arahan dari *principal* (Mulgan,

2000 dalam Mack dan Ryan, 2006). *Agency theory* berfokus pada analisis dua permasalahan, yaitu: pertama adalah *agency problem*, hal ini terjadi ketika terdapat pertentangan tujuan atau keinginan antara *principal* dan *agent*, serta ketika *principal* mengalami kesulitan untuk mengontrol apa yang dilakukan *agent*; kedua adalah *problem of risk sharing*, hal ini terjadi ketika *agent* dan *principal* memiliki perilaku/sikap yang berbeda terhadap suatu risiko (Eisenhardt, 1989).

Di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia, apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. *Agency theory* yang terkait dengan pemerintahan dalam hubungan *agent* dan *principal* lebih menekankan pada penentuan yang lebih baik mengenai efisiensi dalam kontrak antara *principal* dan *agent* menyangkut hal publik, organisasi dan informasi (Eisenhardt, 1989). Akuntabilitas dalam hubungan *agent* dan *principal* menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuatu sesuai dengan arahan *principal*. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas (Mardiasmo, 2006).

Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagimanusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Menurut Jalaludin Rakhmat (2007:51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses penginterpretasian individu terhadap informasi-informasi dari lingkungannya. Ketika *principal* dan *agent* memiliki

kepentingan yang berbeda dimungkinkan dapat menyebabkan beda persepsi atas informasi yang diterimanya walaupun atas informasi yang sama.

Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pengguna laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi empat yaitu: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang berperan dalam donasi, investasi dan pinjaman, (4) pemerintah. Mack dan Ryan (2006) mengkategorikan pengguna laporan keuangan pemerintah dalam tujuh kelompok yaitu: (1) pembayar pajak, (2) penyedia sumber daya, (3) pemilih, (4) penerima jasa, (5) badan pengawas, (6) manajemen internal, (7) entitas lain. Jones (1992) menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan sektor publik ada lima yaitu: badan pemerintah; investor dan kreditor; penyedia sumber daya; badan-badan lain yang berkepentingan dengan pemerintah; pemilih. Dalam penelitian ini, peneliti membagi kelompok *users* dalam tiga kelompok, yaitu *government* (pemerintah daerah yang diwakilipjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah), *society* (DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Akademisi), dan *supervisors* (BPKP dan BPK).

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Budi Mulyana, 2006). Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* (dalam LAN RI dan BPKP, 2001), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan. Benito, Montesinos, and Vela

(2003) menyatakan bahwa reformasi akuntansi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola keuangan (desentralisasi) telah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan menjadi pengendali untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan serta manajemen.

Dengan demikian akuntabilitas adalah instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik guna memudahkan pertanggungjawaban (LAN, 1999). Mack and Ryan (2006) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan sektor publik menilai bahwa laporan keuangan sektor publik lebih sebagai akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan dibandingkan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan. Jones (1985) dalam Alijarde (1997) mengelompokkan *users* dalam konsep *decision-usefulness* dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi keefesienan dan keefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok legislatif dan dewan pengawas

menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana.

Perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2006) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi antara stakeholders terhadap kriteria akuntabilitas dan kriteria transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Suci (2009) menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara *internal users* dengan *external users* atas akuntabilitas publik pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Mack dan Ryan (2006) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah bagi *users* (*internal users* dan *external users*) lebih berguna untuk *accountability* dibandingkan *decision-usefulness*. Penelitian yang dilakukan Barton (2006) menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas keuangan adalah satu aspek yang akan memberikan dampak pada semua program yang dilakukan pemerintah, sehingga persamaan pandangan atas akuntabilitas keuangan perlu dilakukan. Penelitian yang dilakukan Sujana (2001), Wisnu (2007) dan tentang laporan keuangan pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik, menyimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat atas kriteria akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah serta Syafwirdi (2005) juga menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan auditor atas akuntabilitas

keuangan pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

$H_1 =$ Terdapat Perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas publik atas laporan keuangan pemerintah daerah

Keterkaitan antara agent dan principal yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sangat rentan akan terjadi permasalahan, sehingga agent perlu menunjukkan kepada principal bahwa agent telah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan arahan dan mandat dari principal. Agency problem terjadi ketika terdapat pertentangan tujuan atau keinginan antara principal dan agent, serta ketika principal mengalami kesulitan untuk mengontrol apa yang dilakukan agent (Eisenhardt, 1989). Dalam teori keagenan tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat gap kepentingan antara agent dan principal, oleh karenanya sangat dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi antara agent dan principal. Laporan keuangan pemerintah daerah bisa menjadi sarana yang konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyana, 2006). Penelitian yang dilakukan Anondo (2004), Sukhemi (2012) dan Anies (2012) tentang laporan keuangan pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik, menyimpulkan bahwa laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah. Suci (2009) menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara *internal users* dengan *external users* atas akuntabilitas publik pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Syafwirdi (2005) juga menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan auditor atas akuntabilitas publik pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah $H_2 =$ Terdapat erbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas publik atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah peengguna laporan keuangan pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti mengelompokkan *users* dalam tiga kelompok sampel yaitu *Government*, *Society* dan *Supervisor*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi penelitian yang memenuhi kreteria pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sampelnya adalah 51 pejabat pengelola

keuangan SKPD (*government*), 45 anggota DPRD, 10 akademisi (*Society*) dan 25 auditor BPK dan 30 auditor BPKP (*supervisor*).

Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Instrumen untuk mengukur persepsi akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik menggunakan kuesioner berdasarkan indikator-indikator akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik yang ada dalam penelitian Mack dan Ryan (2006) yang kemudian peneliti sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Skala pengukuran menggunakan skala *Likert* lima poin (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Pengambilan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dilakukan dengan mendatangi langsung responden di masing-masing intansi yang bersangkutan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang dibagikan kepada responden 51 Pengelola Keuangan SKPD 45 Anggota DPRD, 10 Akademisi 25 Auditor BPK dan 30 Auditor BPKP	161
2	Kuesioner yang kembali 39 Pengelola Keuangan SKPD 26 Anggota DPRD, 6 Akademisi 16 Auditor BPK dan 18 Auditor BPKP	99
3	Kuesioner yang tidak dapat dipakai	6
4	Kuesioner yang dapat dipakai	93

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabulasi tersebut dapat diketahui bahwa respon rate kuesioner adalah

61,49%, sehingga terdapat 38,51% atau 62 kuesioner yang tidak mendapat respon. Dari

99 kuesioner yang kembali hanya sekitar 93,94% yang dapat dipakai, sisanya 6,06% tidak dapat dipakai dikarenakan data tidak lengkap. Dari hasil pengumpulan data kuesioner menunjukkan bahwa data responden yang diteliti dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas terhadap item-item pertanyaan dari variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik menunjukkan nilai *corrected item total correlation* (r-hitung) yang lebih besar terhadap nilai r-tabel *product moment* dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05\%$. Hal ini berarti semua butir pertanyaan valid.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik menunjukkan nilai koefisien *Cronbach's Alphas* masing-masing sebesar 0,755 dan 0,750 lebih besar dari 0,600. Hal ini berarti variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik handal.

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Hasil uji normalitas terhadap variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* masing-masing sebesar 0,756 dan 0,841 dengan probabilitas signifikan masing-masing sebesar 0,616 dan 0,469 lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik telah terdistribusi normal.

Hasil uji homogenitas terhadap variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik menunjukkan nilai koefisien *Sig.* yang lebih besar dari *alpha* atau tingkat kesalahan $\alpha = 0,005$. Hal ini berarti bahwa data-data variabel akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas publik berasal dari populasi yang bervariasi homogen atau sama.

Hasil Analisis Varian Satu Arah (*One-Way Anova*)

Hasil analisis varian atau *analysis of variance* (Anova) pada variabel akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa besaran varian antar kelompok (*between groups*) sebesar 59,12% yang berarti bahwa 59,12% varian pada variabel akuntabilitas keuangan disebabkan oleh variasi atau perbedaan pada nilai variabel *users*. Selebihnya sebesar 40,88% varian dalam kelompok (*within groups*) tidak diketahui penyebabnya. Hasil pengujian per pasangan menunjukkan bahwa terdapat pasangan yang berbeda secara signifikan, hal ini terlihat pada pasangan *Government – Society* dan *Government – Supervisor* dimana nilai signifikansi (*Sig.*) kedua pasangan tersebut sama-sama sebesar 0,000 atau lebih kecil *alpha* (α) sebesar 0,005. Sebaliknya untuk pasangan *Society – Supervisor* menunjukkan tidak ada perbedaan, hal ini terlihat dimana nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,957 atau lebih besar dari *alpha* (α) sebesar 0,005.

Hasil analisis varian atau *analysis of variance* (Anova) pada variabel akuntabilitas publik menunjukkan bahwa besaran varian antar kelompok (*between groups*) sebesar 66,78% yang berarti bahwa 66,78% varian pada variabel akuntabilitas publik disebabkan oleh variasi atau perbedaan pada nilai variabel *users*. Selebihnya sebesar 33,22% varian dalam kelompok (*within groups*) tidak diketahui penyebabnya. Hasil pengujian per pasangan menunjukkan bahwa seluruh pasangan berbeda secara signifikan, hal ini terlihat bahwa pasangan *Government – Society*, *Government – Supervisor* dan *Society – Supervisor* dimana nilai signifikansi (*Sig.*) ketiga pasangan tersebut masing-masing sebesar 0,001, 0,000 dan 0,002. Seluruhnya lebih kecil dari *alpha* (α) sebesar 0,005 yang artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai akuntabilitas publik untuk masing-masing setiap pasangan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil analisis untuk hipotesis pertama menunjukkan besarnya koefisien *Significance*(Sig.) adalah 0,003 yang berarti lebih kecil dari alpha atau tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan yaitu 0,005. Hasil koefisien F hitung sebesar 5,907 lebih besar dari F tabel sebesar 3,097. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama berupa terdapat perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diterima.

Hasil analisis untuk hipotesis kedua menunjukkan besarnya koefisien *Significance* (Sig.) adalah 0,002 yang berarti lebih kecil dari alpha atau tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan yaitu 0,005. Hasil koefisien F hitung sebesar 3,468 lebih besar dari F tabel sebesar 3,097. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua berupa terdapat perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diterima.

Perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama diatas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi secara signifikan antara *users* yakni *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sujana (2001), Wisnu (2007) dan Suci (2009) yang menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat atas kriteria akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Syafwirdi (2005) juga menyatakan bahwa

masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan auditor atas akuntabilitas keuangan pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya persepsi yang berbeda dimana pihak *Government* menyatakan keberlangsungan keuangan tidak bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah tapi dilihat dari proses penetapan APBD hingga pelaksanaannya. Tapi dari pihak *Society* menyatakan bisa dilihat dari pos kas yang tertuang dalam neraca pemerintah daerah. Pihak *supervisor* menyatakan belum adanya kriteria penilaian keberlangsungan keuangan dalam peraturan perundangan-undangan, dan sebagian besar daerah ketergantungannya dengan pemerintah pusat masih besar. Untuk indikator akuntabilitas keuangan mengenai pemenuhan kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang serta ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, *users* hanya berbicara secara normatif karena memang informasi yang diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki utang yang signifikan. Sama halnya dengan indikator ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, *users* hanya berbicara normatif yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah tercantum dalam APBD, karena sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya persepsi yang berbeda mengenai pencapaian tujuan dimana pihak *Government* menyatakan tidak ada informasi mengenai pencapaian tujuan dan evaluasi pembangunan yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah, semua informasi tersebut ada di SKPD bersangkutan. Tapi dari pihak *Society* menyatakan ada karena merupakan informasi pencapaian tujuan tersebut adalah yang patut diketahui oleh masyarakat, sama halnya dengan evaluasi yang terlihat berupa angka-angka perbandingan tahun lalu sama

dengan tahun berjalan. Pihak supervisor menyatakan pencapaian tujuan ditanya sama masyarakat bagaimana mereka menilainya, tapi kalau dari auditor hanya menilai pelaksanaan dan pertanggungjawaban saja.

Perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas publik atas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua diatas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi secara signifikan antara *users* yakni *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas publik atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Suci (2009) yang menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara *internal users* dengan *external users* atas akuntabilitas publik pada laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Syafwirdi (2005) juga menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan auditor atas akuntabilitas publik pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Untuk indikator mengenai *best interest*, *users* berbicara normatif dan pada umumnya sama dengan mengacu pada program-program prioritas yang tertuang dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. adanya persepsi yang berbeda dimana pihak *Government* menyatakan *best interest* bisa diketahui dari masing-masing SKPD terkait, kalau dilihat dari sisi anggaran sudah tercantum dalam APBD. Tapi dari pihak *Society* menyatakan tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut, walaupun ada mungkin kebetulan membacanya tapi menurutnya secara umum sudah bagus. Pihak supervisor menyatakan hanya mengacu pada peraturan yang berlaku. Untuk indikator efektif dan efisien adanya persepsi yang berbeda dimana pihak *Government* menyatakan efektif program-program yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bisa diketahui proses mulai dari musrenbang hingga masuk pada APBD, kalau efisien bisa dijelaskan kepada SKPD terkait. Tapi dari pihak *Society* menyatakan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi sudah efektif tapi kalau efisien belum karena dilihat banyak tenaga kerja PNS yang tidak bekerja secara optimal. Pihak supervisor menyatakan kalau efektif dan efisien bisa dilihat kalau pemerintah daerah dilakukan audit kinerja atau operasional. Untuk indikator pengelolaan sumber daya adanya persepsi yang berbeda dimana pihak *Government* menyatakan pengelolaan sumber daya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai prosedur dan kemampuan pemerintah menggali potensi yang ada. Tapi dari pihak *Society* menyatakan masih banyak sebenarnya yang masih bisa digali dari potensi-potensi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pihak supervisor menyatakan hasil pengelolaan sumber daya dapat dinilai dari segi pertanggungjawaban dan penilaian opininya.

Untuk indikator kemanfaatan di masa mendatang dan penggunaan uang publik secara tepat, *users* tidak dapat memberikan gambaran yang jelas, mereka hanya berbicara secara normatif dan pragmatis karena tidak yakin atas penjelasan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Untuk indikator perkiraan dan gambaran pendanaan di masa mendatang, *users* memberi gambaran yang tidak jauh berbeda yang pada intinya menilai bahwa proyeksi pendanaan tidak ada tercantum dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji statistik dan wawancara maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terbukti. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar yang baku dalam penilaian akuntabilitas keuangan, masing – masing *users* memiliki kriteria masing-masing dalam memberikan penilaian akuntabilitas keuangan.
2. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara *Government*, *Society* dan *Supervisor* mengenai akuntabilitas publik atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terbukti. Hal ini dikarenakan masing – masing *users* memiliki intrepresiasi sendiri dalam menentukan ukuran yang digunakan untuk menilai akuntabilitas keuangan

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah sebaiknya menjalin komunikasi dengan para *users* sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud tanggungjawab atas amanat yang diemban dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel.
2. Pemerintah daerah bersama-sama dengan *users* berkoordinasi untuk menetapkan tolok ukur yang dapat dipahami bersama agar dapat icantumkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai laporan pertanggungjawaban yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
3. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang menyajikan informasi-informasi yang sepadan dan telah disepakati bersama dengan *users* untuk meminimalisir perbedaan persepsi sehingga tujuan mewujudkan laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Anondo, Daru 2004. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik: Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada.
- Barton, Allan D. 2006. Public Sector Accountability and Commercial in Confidence Outsourcing Contracts. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.19(2):256-271.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review. 14(1):57-74
- Hoque, Zahirul. 2004. Rationality, Accountability Reform and Accounting for or Land Under Roads in an Australian Local Government. *Journal of Public Budgetary Accounting & Financial Management*.16(1):1-18.
- Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Mack, Janet., and Ryan, Christine. 2006. Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 19(4): 592-612
- Mardiasmo.2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1):1-17
- Marom, Chairul. 2001. *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Mayston, David. 1992. Capital Accounting, User Needs and The Foundation of A Conceptual Framework for Public

- Sector Financial Reporting. *Journal Financial Accounting and Management*. 8(4):227-248
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah*. 2(1)
- Parker, L., and Gould, G. 1999. Changing public sector accountability: critiquing new direction. *Accounting Forum*. 23(2): 109-135
- Sujana. Edy. 2001. Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Sukhemi (2012). Pengaruh Penyajian Neraca Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Sutedjo.2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Syafwirdi. 2005. Analisis Pelaporan Keuangan Sektor Publik Untuk Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Publik: Studi Kasus Pada Pemerintah Tingkat Ii Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Walgito. Bimo. 2001. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Wisnu, H. 2007. Persepsi Stakeholders terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuanganpada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis Program PascaSarjana UGM (Tidak dipublikasikan) Yogyakarta*.
- Wulandari. Suci. 2009. Persepsi Users atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.